

**GERAKAN MADRES DE LA PLAZA DE MAYO DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENEGAKAN HAM DI ARGENTINA**

Oleh:

Michael Junanda Ludong

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Email: Michael.junanda@gmail.com

Adi Suryadi Culla

(Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin)

Email: adisuryadiculla@gmail.com

Pusparida Syahdan

(Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin)

Email: Pusparida@unhas.ac.id

Abstract

This research aims to understanding and explaining the strategy used by Madres De La Plaza de Mayo Movement to establishing human rights enforcement in Argentina as well as Understanding and explaining the impact of the efforts undertaken by the Madres De La Plaza de Mayo Movement towards human rights establishment in Argentina. For that, in achieving the objectives, the writer uses descriptive analytic method. The data collection techniques used is a literature review. To process and analyze the data, the authors use qualitative analysis techniques and to discuss and explain the results of the analysis, the authors use inductive-deductive writing technique. The results obtained from this study indicate that the Madres De La Plaza de Mayo is a movement that arose as a result of human rights violations committed by the military regime in Argentina in 1976-1983. This movement then taking action in protest and demanded the Argentine government to enforce human rights in Argentina. In conducting the efforts, the movement was able to build a network and cooperation with foreign actors either NGO, IGO and other countries for support and simultaneously pressed the Argentine government in relations to defending human rights voiced by this movement. This strategy then have a positive impact in encouraging the emergence of democracy in Argentina and broadly encourage the emergence of a series of policies and measures in the various aspects of human rights in Argentina.

Latar Belakang Masalah

Dunia global masa kini, sedang banyak membicarakan dan menaruh perhatian yang serius terhadap isu-isu yang berkenaan dengan HAM, seperti

persoalan mengenai kesetaraan, diskriminasi rasial, tindakan penghilangan paksa (*forced disappearance*), dan sebagainya. Oleh karena itu, dunia internasional melihat betapa penting dan krusialnya nilai-nilai dan gagasan HAM untuk diperjuangkan di berbagai belahan dunia. Untuk mengurangi bahkan bercita-cita untuk menghapuskan segala bentuk pelanggaran HAM, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 memproklamasikan dalam *United Nations Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Meskipun begitu, pada prakteknya, tetap saja pelanggaran terhadap HAM atau munculnya kebijakan-kebijakan negara yang tidak sesuai dengan standar HAM yang telah diratifikasi oleh dunia internasional terjadi. Seperti kasus di Argentina pada tahun 70-an.

Pada tanggal 24 Maret 1976 pihak militer Argentina melakukan kudeta dan berhasil mengambil alih pemerintahan Argentina yang sebelumnya dipimpin oleh Isabel Peron. Dibawah pimpinan Jenderal Jorge Rafael Videla, pihak militer Argentina berniat untuk mengorganisasi ulang sistem politik di Argentina yang dianggap telah jatuh dan kacau dibawah pemerintahan Peron. Dengan mengatasnamakan nasionalisme, pihak militer kemudian mengontrol secara total pemerintahan dan membentuk rezim otoritarian baru.¹

Untuk mempertahankan kekuasaan guna mencapai tujuannya, disepakatilah sebuah operasi militer yang bernama *Operation Condor*.² Operasi ini bertujuan untuk mengeliminir pengaruh dari ide-ide sayap kiri yang berkembang di Argentina di bawah pengaruh komunisme dalam Perang Dingin. Dalam prakteknya, operasi militer ini melakukan banyak cara-cara yang tidak manusiawi seperti pembunuhan, penculikan, penganiyaan, penyiksaan dan tindak kekerasan lainnya. Semua cara itu dilakukan tanpa adanya bukti-bukti yang kuat terhadap para korban atau tersangka dan dilakukan tanpa adanya proses-proses peradilan yang legal.

Tidak hanya itu, dalam melaksanakan paktek-praktek pemerintahannya, rezim militer yang berkuasa di Argentina juga membekukan konstitusi dan kongres serta melakukan penekanan terhadap media dan pers. Hal ini dilakukan dengan klaim bahwa Argentina sedang bergerak melawan tindakan-tindakan subversif. Seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan atas tindakan teror yang tidak bertanggungjawab yang terus dilakukan oleh rezim pemerintahan Argentina mendorong lahirnya gerakan dan protes dari masyarakat. Salah satu gerakan protes yang muncul sebagai akibat dari teror yang dilakukan oleh rezim militer yang berkuasa di Argentina adalah gerakan yang diinisiasi oleh perempuan yang berstatus ibu atau istri dari para korban penangkapan dan penculikan, yang lebih dikenal dengan nama *Madres De La Plaza de Mayo*

¹Elizabeth de Lima-Dantas, 1985, *Argentina a country study*, Washington D.C, dieditoleh James D Rudolph, American University Foreign Area Studies, Department of the Army. Hal. 66-69.

²John Dinges, 2004, *The Condor Years: how Pinochet and his allies brought terrorism to three continent*, The New Press, New York, London. Hal. 2.

(Mothers of the Dissappeared).

Tinjauan Pustaka

Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional

Perkembangan dunia internasional semakin kompleks, menyebabkan berbagai persoalan yang tentunya menunculkan beragam aktor yang terlibat. Salah satu hal yang menarik adalah kemunculan dan pengaruh aktor-aktor non-negara. Kemunculan aktor-aktor non-negara ini, dalam beberapa kasus disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan dan isu-isu *low politics* lainnya. Kondisi ini mendorong padatnya aktivitas interaksi antar aktor-aktor internasional dan menguatnya pengaruh dari aktor-aktor non-negara yang juga mampu mempengaruhi wacana dan kondisi politik internasional, seperti yang dikemukakan Karbo dan Lee Ray:

*While states have been the primary focus of attention in the study of international relations, (...) there are actors of a different kind in global politics with which states vie for influence.*³

Lebih lanjut, meminjam pengertian Alejandro Colas mengenai *International Civil Society* yang menekankan pada kemunculan aktor-aktor non-negara yang memiliki karakter dan corak sosial-politik dalam dunia internasional;

*"Alejandro Colás argues for the relevance of 'voluntary, non-state, collective social and political agency' in international relations. He defines civil society as the social domain 'where modern collective political agency takes shape', and argues that these movements have displayed international characteristics from their inception"*⁴

Berdasarkan definisi diatas,dapat dikatakan bahwa agen ataupun kelompok sosio-politik yang berbasiskan kolektivitas dan voluntaristik initelah mengambil bagian dalam masyarakat internasional dan gerakan-gerakan semacam ini telah menunjukkan karakter-karakter internasional semenjak awal pembentukannya. Selajutnya menurut Colas, para aktor non-negara ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau bahkan dalam skala internasional melalui berbagai aktivitas seperti demonstrasi massal, solidaritas dan kampanye internasional. Arah gerak dari para aktor non-negara ini sebenarnya lebih terfokus dalam mempertanyakan atau merubah suatu tindakan atau kebijakan tertentu yang dilakukan oleh suatu otoritas baik

³Karbo dan Lee Ray, 2011, *Global Politics*, Boston: Wadsworth, hal. 116-117

⁴Alejandro Colas, 2002, *International Civil Society – Social Movements in World Politics*,Cambridge, Polity Press, hal. 1 dalam Peter Utnes, 2010,*Non-state Actors in World Politics: A case study on how transnational advocacy networks seek to influence the Arms Trade Treaty*, Universitetet i Tromsø, hal. 8.

domestik ataupun internasional.⁵

Transnational Advocacy Network (TAN)

Kemunculan dan pengaruh aktor-aktor non-negara mendorong perubahan dinamika dalam dunia internasional yang secara eksplisit meminimalisir peran negara dalam aktifitas-aktifitas hubungan internasional. Salah satu bentuk interaksi para aktor non-negara ini adalah *Transnational Advocacy Network* menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink adalah aktor-aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu, aktor-aktor ini disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang padat. Aktor-aktor ini bekerja secara terorganisir untuk mengangkat masalah, ide-ide prinsipil dan norma-norma. Aktor-aktor ini juga kadang terlibat dalam upaya advokasi terhadap seorang individu yang jauh dari kepentingan rasional mereka.⁶

Bentuk interaksi dan relasi yang ‘mencair’ disatu sisi ditunjang oleh ‘padat’nya sirkulasi dan pertukaran informasi dalam TAN, sehingga memungkinkan keterbukaan terhadap isu atau fenomena baru, serta kemungkinan munculnya aktor-aktor yang kemudian terlibat dalam aktifitas jejaring. Salah satu hal yang menarik adalah pola atau model interaksi aktor dalam TAN yang disebut dengan ‘*Boomerang Pattern*’.⁷

Boomerang Pattern muncul sebagai pola atau model interaksi antar aktor dalam TAN sebagai akibat dari terhambatnya jalur aspirasi dari aktor-aktor domestik dalam suatu negara ke pihak pemerintahnya sendiri. Aktor-aktor ini mengambil langkah alternatif atau melakukan *bypass* dengan membangun jaringan dengan aktor-aktor internasional untuk mencari dukungan dan memperjuangkan isu yang diusungnya, dan juga untuk mempengaruhi pemerintah di negaranya dari luar. Untuk melaksanakan hal ini, Keck dan Sikkink membagi taktik yang dapat digunakan TAN ke dalam empat tipologi, yaitu; *Information Politics* adalah kemampuan untuk secara cepat dan tepat mengembangkan informasi yang secara politis berguna dan mengarahkan ke mana informasi tersebut akan menghasilkan pengaruh yang besar.

Symbolic Politics adalah kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita dan kisah yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang dibawa kepada audiens lain. *Leverage Politics* merupakan kemampuan untuk menarik aktor-aktor yang kuat untuk lebih memperkuat jaringan. Dalam *leverage politics* terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu *Material Leverage*, berupa sebuah kondisi dimana aktor-aktor yang lebih kuat

⁵Alejandro Colas, 2002, *International Civil Society – Social Movements in World Politics*, Cambridge, Polity Press, hal. 62-170.

⁶Keck dan Sikkink, *loc cit.*, hal. 89-92

⁷*ibid*, 93

memberikan tekanan kepada negara target dari TAN berupa tekanan dengan menggunakan kebijakan politik ataupun ekonomi dalam level internasional untuk menekan negara target terkait isu yang dipermasalahkan. Yang kedua adalah *Moral Leverage*, dimana aktor-aktor yang lebih kuat memberikan sorotan bagi negara target sehingga negara target tersebut merasa citranya dimata internasional menjadi turun dan perlu untuk merespon positif sorotan tersebut. *Accountability Politics* adalah kemampuan untuk membuat aktor-aktor yang kuat tetap konsisten pada nilai atau norma yang prinsipil atau kebijakan politik yang telah disepakatinya.⁸

Pada prakteknya, untuk menilai dan mengevaluasi pengaruh dari TAN, perlu diketahui sejauh mana pencapaian atau yang telah diperoleh. Untuk itu, terdapat lima tahapan yang digunakan yaitu: Pada tahapan pertama, TAN mampu meningkatkan perhatian publik, baik domestik atau internasional, terhadap suatu isu dan mampu memancing dan menimbulkan perhatian media, perdebatan, audiensi dan pertemuan-pertemuan yang membahas isu terkait yang sebelumnya tidak menjadi hal penting dalam perdebatan publik. Pada tahapan kedua, TAN mampu meyakinkan satu atau lebih negara-negara dan organisasi internasional untuk mendukung suatu norma maupun deklarasi internasional atau untuk merubah posisi keberpihakan kebijakan politik luar negeri mereka. Pada tahapan ketiga, TAN dapat mempengaruhi perubahan prosedur institusional dalam internal negara, organisasi internasional maupun pihak lain yang menjadi target utama. Perubahan prosedural meningkatkan peluang bagi pihak-pihak lain untuk menjadi penekan dari internal negara, organisasi internasional, maupun pihak lain yang mejadi target dari TAN. Pada tahapan keempat, TAN mendorong dan mendesak perubahan kebijakan politik dari target utama mereka. Dan pada tahapan terakhir, TAN mampu mempengaruhi prilaku dan tindakan negara dalam upaya penegakan dan pelaksanaan kebijakan di waktu mendatang.⁹

Hak Asasi Manusia (HAM)

Universal Declaration Of Human Right (UDHR) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948 menunjukkan komitmen tiap negara-negara dan entitas internasional lainnya di dunia untuk mempromosikan nilai-niai HAM dan menjaga penegakan HAM dalam setiap tindakannya. Pentingnya eksistensi dan martabat seorang individu merupakan hal yang mendasar dalam UDHR 1948, seperti yang tertuang dalam beberapa pasal yaitu; Pasal 1 menjelaskan mengenai status, martabat dan hak asasi yang melekat dalam diri manusia, serta kewajiban tiap manusia untuk bertindak dengan semangat persaudaraan terhadap

⁸*Ibid, hal. 95*

⁹*Ibid, hal. 202-203s*

sesamanya. Pasal 2 menjelaskan mengenai pengakuan terhadap kemerdekaan dan hak asasi tiap individu yang tidak boleh dilanggar atas alasan dan dalam kondisi apapun. Selanjutnya pada Pasal 3 dibahas mengenai hak hidup, kemerdekaan dan keamanan individu. Pasal 5 dan 7 mengatur mengenai pelarangan terhadap penyiksaan, pelecehan harga diri dan hukuman terhadap individu serta kesetaraan setiap manusia dihadapan hukum, sehingga segala jenis diskriminasi yang dapat menciderai kesetaraan tersebut menjadi hal yang terlarang.¹⁰

Pada perkembangan upaya penegakan HAM di dunia internasional, terdapat sebuah kovenan internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang secara terperinci memuat hak-hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu yang menjadi warga negara tanpa terkeuali. Terdapat beberapa pasal penting dalam kovenan ini yang perlu untuk digarisbawahi, antara lain pada Pasal 2 Ayat 1 yang menekankan kewajiban tiap negara untuk memastikan dan menjamin pemenuhan terhadap hak-hak sipil dan politik terhadap warga negaranya.¹¹

Selain itu pada beberapa pasal lainnya seperti Pasal 6 diatas menjelaskan mengenai hak seorang individu untuk hidup dan dilindungi oleh hukum. Selanjutnya Pasal 7 menjelaskan mengenai pelarangan terhadap individu terhadap tindakan penyiksaan, pelecehan terhadap harga diri dan hukuman. Pada Pasal 9 Ayat 1 dan 2, diatur mengenai hak kemerdekaan individu dan keamanan seseorang. Selain itu, pasal tersebut juga menjelaskan mengenai pelarangan terhadap tindakan penahanan secara sewenang-wenang tanpa prosedur yang legal dimata hukum dan juga hak seorang individu untuk diberi tahu alasan perihal penahanan serta tuntutan hukuman yang akan dijalaninya.¹²

Menurut *International Criminal Court* (ICC), terdapat 4 jenis pelanggaran HAM berat dan salah satunya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) yaitu apabila terdapat suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis melakukan serangan terhadap penduduk sipil maka dapat disebut kejahatan terhadap kemanusiaan atau *Crimes Against Humanity*.¹³ Pelanggaran HAM semacam itu, terutama yang dilakukan oleh negara dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu pelanggaran karena *Act of Commission* atau *Act of Omission*.¹⁴ Pelanggaran dalam kategori *Act of Commission* dapat diartikan bahwa negara tersebut terbukti terlibat secara langsung atau

¹⁰United Nations, *1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights*, article 1, 2, 3, 5, 7

¹¹*International Covenant on Civil and Political Rights 1966*

¹²*ibid*

¹³Elements of Crime
https://www.iccpi.int/en_menus/icc/aboutthecourt/frequentlyaskedquestions/Pages/12.aspx, diakses pada 4 januari 2016.

¹⁴https://www1.umn.edu/humanrts/instreet/Maastrichtguidelines_htmlunduh pada 6 februari 2016.

dalam perencanaan terhadap pelanggaran HAM. sedangkan dalam kategori *Act of Omission*, dapat diartikan bahwa negara terbukti melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.

Kondisi Sosial dan Politik di Argentina dan Pelanggaran HAM di Bawah Rezim Militer Vidella.

Kudeta militer yang terjadi di Argentina pada tahun 1976 berhasil melengserkan Isabel Peron dari jabatan kepresidenan Argentina. Peron digantikan oleh jendral militer Argentina, Jorge Rafael Vidella. Tujuan penggulingan kekuasaan ini adalah untuk mengorganisasi ulang sistem politik di Argentina yang lebih dikenal dengan istilah *National Reorganization Process* (NRP) atau *El Proceso*.¹⁵ Tujuan dari NRP mencakup hal-hal fundamental bagi kehidupan bernegara di Argentina. Hal-hal seperti pengembalian nilai-nilai yang esensial sebagai fondasi negara Argentina, pemberantasan gerakan subversif dan peningkatan pembangunan ekonomi bagi kemajuan rakyat Argentina merupakan hal inti dalam tujuan NRP untuk menjawab kondisi keterpurukan dan kekacauan yang terjadi di Argentina.¹⁶

Dalam rangka mencapai tujuannya, rezim militer dibawah pemerintahan Vidella membekukan konstitusi Argentina 1853 dan menggantikannya dengan *the Statute for the National Reorganization Process* pada bulan maret 1976, yang memberikan wewenang penuh kepada pihak militer yang diwakili oleh tiga jendral dari tiga badan militer yaitu angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut, sebagai institusi tertinggi untuk menjalankan pemerintahan¹⁷ Pembatasan atau sensor terhadap media massa juga tetap dilakukan oleh rezim militer dibawah kepemimpinan Vidella seperti yang terjadi di era presiden Peron dengan mengeluarkan suatu peraturan yang membatasi publikasi pers dan media:¹⁸ Selain itu, pemerintah juga melakukan teror dan penculikan pada beberapa jurnalis yang dianggap pro terhadap pihak-pihak subversif, seperti yang terdapat dalam *press release* yang dipublikasikan oleh CONADEP¹⁹.

NRP yang ditargetkan oleh pemerintah rezim militer juga berujung pada

¹⁵Andres Delgado, 2012, *Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina, Graduate Theses and Dissertations*, University of South Florida, hal. 12.

¹⁶Ernesto Torres, *Under the Shadow of the Dictatorship: Comics and Culture During the Process of National Reorganization*, www.camouflagecomics.com, hal.10 diunduh pada 14 januari 2016.

¹⁷Elizabeth de Lima-Dantas, 1985, *Argentina a country study*, Washington D.C, diedit oleh James D Rudolph, American University Foreign Area Studies, Department of the Army. Hal. 66-67

¹⁸David Cox, 2008, *Dirty Secrets, Dirty War*. Charleston: Evening Post Publishing Company, Kindle edition dalam Sarah Cusick, 2013, *PERSPECTIVES AND ANGLES: A JOURNALISTIC HISTORY THROUGH THE ARGENTINE POLITICAL IDENTITY FROM 1946-1983*, Appalachian State University, hal. 60.

¹⁹http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_245.htm diakses pada 13 januari 2016.

pembunuhan dan 'penghilangan paksa' terhadap masyarakat di Argentina. Rangkaian tindakan ini dimilau dengan upaya penculikan yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun kelompok para-militer yang berafiliasi dengan pemerintah.²⁰ Setelah diculik, korban penculikan kemudian dibawa ke tempat penahanan yang khusus digunakan sebagai tempat untuk menahan dan mengorek informasi dari orang-orang yang telah ditangkap. Di tempat itu, para korban disiksa oleh orang-orang yang tidak mereka kenal²¹ Cara terakhir yang dilakukan oleh rezim militer Argentina dalam rangka melawan gerakan subversif dan mengeliminir pengaruhnya adalah dengan membunuh atau 'menghilangkan' orang-orang yang dituduh terlibat dalam gerakan subversif²². Menurut CONADEP, selama kepemimpinan rezim militer setidaknya terdapat 8.960 orang warga negara Argentina yang menjadi korban penghilangan paksa.²³

Gerakan *Madres De La Plaza de Mayo* adalah gerakan yang diinisiasi oleh ibu-ibu yang anaknya menjadi korban dari rezim militer Argentina. Gerakan ini muncul untuk menuntut status dan keberadaan anak-anak mereka serta menuntut penegakan atas berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim militer yang mengakibatkan anak-anak mereka menjadi korban. Mereka merupakan satu-satunya kelompok yang berani mengkonfrontasi tindakan represif rezim militer. Gerakan ini mulai melakukan aksi publiknya pada tanggal 30 april 1977, dimulai oleh 14 orang ibu-ibu yang melakukan *marching* di *Plaza de Mayo*, yaitu sebuah alun-alun kota di Buenos Aires yang berada di depan istana kepresidenan Argentina.²⁴ Setiap hari kamis mereka berkumpul di alun-alun kota *Plaza de Mayo* kemudian berjalan mengelilingi alun-alun tersebut sambil membawa foto serta nama dari anak-anak mereka yang hilang, dan mengenakan kain putih dikepala mereka²⁵

Selama masa pemerintahan rezim militer Argentina dibawah pimpinan Vidella, tidak ada upaya penegakan HAM yang diinisiasi oleh pemerintah untuk merespon tuntutan terkait penegakan HAM dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang disuarakan oleh masyarakat Argentina maupun pihak-pihak internasional²⁶ Upaya untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM dan tuntutan untuk penegakan HAM sendiri justru datang dari masyarakat

²⁰http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_005.htm
diakses pada 16 januari 2016.

²¹ibid

²²ibid

²³http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_209.htm
diakses pada 17 januari 2016.

²⁴<https://socialhistory.org/ru/collections/madres-de-plaza-de-mayo>

²⁵Rachel Koepsel, 2011, *Mothers of the Plaza de Mayo: First Responders for Human Rights*, Case-Specific Briefing Paper, University of Denver, hal. 3.

²⁶David Weissbrodt dan Maria Luisa Bartolomei, 1991, *The Effectiveness of International Human Rights Pressures: The Case of Argentina, 1976-1983*, Scholarship Repository, University of Minnesota Law School, hal. 1013

Argentina. Upaya masyarakat ini tersalurkan melalui kelompok-kelompok gerakan masyarakat, salah satunya yang paling terlihat dan menjadi pelopor adalah gerakan *Madres De La Plaza de Mayo*. Gerakan ini melakukan beberapa upaya, antara lain dengan kampanye dan demonstrasi dalam bentuk *marching* di alun-alun kota depan istana kepresidenan Argentina, melakukan publikasi untuk menyebarluaskan kampanye seperti penyebaran pamflet, *newsletter*, pembuatan petisi dan menyebarkannya melalui surat kabar lalu ditujukan khusus kepada presiden, pengadilan tinggi, perwira militer, pihak gereja

Selain berkampanye dan berdemonstrasi, gerakan ini juga membangun jaringan kerjasama dengan kelompok atau organisasi lain untuk membentuk solidaritas. Salah satu upaya yang perlu digarisbawahi dari gerakan ini adalah kemampuan mereka untuk membangun jejaring internasional dengan beberapa organisasi internasional seperti *Amnesty Internasional*, *IACHR*, *International Federation of Human Rights*, *Lawyers Committee for Human Rights*, *United Nations*.²⁷

Pasca jatuhnya rezim militer tahun 1983, Argentina telah memasuki tahap awal pemerintahan sipil yang demokratis. Dibawah pemerintahan presiden Alfonsin, Argentina melakukan beberapa upaya terkait persoalan penegakan HAM, diantaranya melalui pembentukan komisi atau sebuah badan khusus yang diberi nama CONADEP (*Comisi'on Nacional por la Desaparici'on de Personas*). Komisi ini dibentuk pada tahun 1983 dan bertugas untuk melakukan investigasi kasus dari orang-orang yang hilang selama masa pemerintahan rezim militer. Komisi ini dibentuk untuk mendapatkan pernyataan dan bukti terkait kasus-kasus pelanggaran HAM dan kemudian menyerahkannya ke pengadilan jika terbukti melanggar hukum.²⁸ Hasil kinerja dari CONADEP selanjutnya di dokumentasikan dalam bentuk buku yang berjudul *Nunca Mas (Never Again)*:²⁹ Buku ini juga telah dipublikasikan secara luas dalam dua bahasa yaitu bahasa latin dan bahasa Inggris. Selain melakukan investigasi dan penyelidikan, CONADEP juga bekerja sama dengan *American Association for the Advancement of Sciences (AAAS)*³⁰ Kerjasama ini dilakukan untuk menyelidiki dan menginvestigasi anak-anak yang orangtuanya menjadi korban penghilangan paksa. Pemerintah juga dituntut untuk menjalankan program perbaikan atau

²⁷*loc cit*, David Weissbrodt dan Maria Luisa Bartolomei, hal. 1016-1017

²⁸http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/neveragain/neveragain_000.htm

²⁹*ibid*

³⁰Penchaszadeh dan Schuler-Faccini, 2013, *Genetics and human rights. Two histories: Restoring genetic identity after forced disappearance and identity suppression in Argentina and after compulsory isolation for leprosy in Brazil* dalam <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3983581> diakses pada 2 februari 2016

reparation bagi korban atau keluarga korban tindak pelanggaran HAM. Upaya perbaikan ini secara garis besar terbagi dalam tiga aspek, yaitu *restitution of rights, economic reparation, dan symbolic reparation*.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah selain investigasi dan publikasi terkait tindakan pelanggaran HAM di Argentina selama masa pemerintahan rezim militer adalah pencabutan undang-undang imunitas yang dibuat oleh rezim militer diakhir masa kekuasaannya.³¹ Akhirnya di tahun 2003, UU *Ley d Punto Final* atau *Full Stop Law* dan *Due Obedience Law* dicabut, dan pada tahun 2005 dinyatakan *unconstitutional* oleh mahkamah agung karena tindakan kriminal yang dilakukan selama pemerintahan rezim militer tahun 1976 sampai 1983 merupakan *Crime Against Humanity*. Status ini juga berlaku atas status pengampunan yang telah diberikan oleh presiden Menem kepada anggota militer yang telah menjalani hukuman atas dakwaan terhadap tindakan kriminal selama pemerintahan rezim militer di Argentina di tahun 1976-1983.³²

Respon Aktor Internasional

Berbagai aktor internasional turut bergerak dalam penyelesaian dan upaya penegakan HAM di Argentina. Respon internasional ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari dukungan terhadap aktor dan upaya penegakan HAM serta tekanan terhadap pemerintah Argentina. Hal ini dibarengi pula dengan upaya penyelidikan dan investigasi serta publikasi terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Beberapa NGO menjadi bagian dalam upaya penegakan HAM di Argentina. *Amnesty Internasional* mengirim delegasinya untuk melakukan investigasi terkait informasi tentang pelanggaran HAM yang mereka terima dari Argentina.³³ Dalam investigasi tersebut, dilakukan wawancara dan penerimaan testimoni dari para korban penyiksaan dan testimoni personal dari keluarga-keluarga korban. Beberapa hal yang juga dilakukan oleh *Amnesty Internasional* antara lain; melakukan serangkaian aktivitas seperti kampanye internasional, publikasi, dan komunikasi dengan beberapa organisasi HAM internasional terkait kasus pelanggaran HAM di Argentina.³⁴

Dalam beberapa forum internasional mengenai HAM yang diadakan oleh PBB pada tahun 1977 sampai 1980, beberapa NGO dan delegasi dari beberapa negara seperti Perancis, Swedia, Amerika Serikat, Kanada dan Austria telah memasukkan kasus pelanggaran HAM di Argentina sebagai agenda dalam sesi pembahasan dan atas usaha dari beberapa NGO dan kelompok-kelompok gerakan HAM domestik Argentina maupun internasional. PBB melalui

³¹<http://www.trial-ch.org/en/resources/truthcommissions/america/argentina.html> diakses pada 2 februari 2016

³²*ibid*

³³op cit, David Weissbrodt dan Maria Luisa Bartolomei, hal. 1017

³⁴loc cit, David Weissbrodt dan Maria Luisa Bartolomei, hal. 1018

Commission on Human Rights kemudian mulai membangun komunikasi langsung dengan pemerintah Argentina untuk menanyakan terkait komplain dan laporan kasus pelanggaran HAM dan menekan pemerintah Argentina untuk melakukan upaya perbaikan terhadap penegakan HAM.³⁵ Respon internasional berupa dukungan terhadap upaya penegakan HAM di Argentina juga muncul dari berbagai aktor, bukan hanya dari kelompok atau organisasi internasional yang fokus pada isu seputar HAM⁴² Solidaritas atas perjuangan dan upaya penegakan HAM di Argentina juga muncul dari kaum perempuan dan berbagai kalangan dengan latar belakang yang beragam dari beberapa negara³⁶ Kelompok perempuan di beberapa negara di Eropa Barat juga menyatakan dukungan mereka terhadap gerakan ini³⁷

Respon internasional yang lainnya juga datang dari beberapa negara. Salah satunya adalah dari Amerika Serikat³⁸, beberapa negara Eropa Barat juga memberikan bantuan dana kepada gerakan *Madres De La Plaza de Mayo*.³⁹ Dan meminta ekstradisi para pelaku pelanggaran HAM kembali ke Argentina.⁴⁰

Strategi Gerakan *Madres De La Plaza de Mayo* untuk Membangun Jaringan Internasional dalam Upaya Penegakan HAM di Argentina

Tindakan represif dan otoriter yang dilakukan oleh negara dibawah pemerintah rezim militer Argentina mengakibatkan tekanan terhadap kemerdekaan individu dan pada titik tertentu mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah banyak yang dialami oleh masyarakat Argentina. Kebijakan dan tindakan ini bertentangan dengan peraturan dan konstitusi internasional tentang HAM dalam *Bill of Human Rights* dan dikategorikan sebagai *Crimes Against Humanity* yang merupakan merupakan bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat.

Pemerintah Argentina kemudian mendapatkan respon berupa protes dan penentangan dari masyarakat Argentina yang tergabung dalam kelompok-kelompok dan organisasi gerakan yang memperjuangkan HAM. Dalam kondisi seperti ini, gerakan *Madres De La Plaza de Mayo*, dibantu oleh beberapa NGO dan aktivis HAM domestik Argentina, mulai mengambil langkah alternatif dengan mengaplikasikan konsep *boomerang pattern*, yaitu pembangunan komunikasi dan interaksi dengan pihak internasional untuk mencari dan mendapatkan dukungan dalam menjalankan perjuangan mereka sehingga dapat

³⁵*loc cit*, David Weissbrodt dan Maria Luisa Bartolomei, hal. 1028-1029

³⁶*Loc cit*, Marguerite Bouvard, hal. 86-87.

³⁷Gilda Rodriguez, 2004, *The political performance of Motherhood: Las Madres de Plaza de Mayo*, dalam serendip.brynmawr.edu/sci_cult/courses/knowbody/f04/web3/grodriguez.html

³⁸*loc cit*, David Weissbrodt dan Maria Luisa Bartolomei, hal. 1021

³⁹*loc cit*, Kathryn Sikkink.

⁴⁰<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Argentina-Accountability-Case-2005-English.pdf> hal. 4 diunduh pada 8 februari 2016

mempengaruhi dan menekan pemerintah. Upaya ini dilakukan karena kebuntuan dan keterbatasan terhadap akses untuk melakukan protes yang diakibatkan oleh reaksi negatif dan tekanan dari pemerintah. Gerakan *Madres De La Plaza de Mayo* yang dibantu oleh beberapa NGO domestik dan beberapa aktor internasional terutama NGO HAM internasional kemudian bersama-sama bergerak dan berjuang untuk mengatasi persoalan HAM di Argentina dengan membentuk suatu jaringan advokasi internasional yaitu *Transnational Advocacy Network* (TAN).

Salah satu hal penting yang menjadi inti dalam aktifitas para aktor dalam perjuangan HAM di Argentina adalah informasi. Ini berkaitan dengan ketersediaan informasi yang telah diproses dan dikembangkan untuk kepentingan jaringan dan kemudahan serta ketersediaan akses terhadap informasi tersebut. Data-data tersebut selanjutnya didokumentasikan dan disebarakan bukan saja kepada publik, tapi juga dibawa dan diajukan ke institusi-institusi internasional untuk ditindaklanjuti.

Informasi tersebut berupa data mengenai fakta hasil temuan dalam investigasi yang mereka lakukan dari sumber-sumber yang ditutup oleh pemerintah Argentina. Bukan hanya persoalan kelangkaan dan eksklusivitas data, tapi juga informasi tersebut memiliki nilai otentisitas dan reliabilitas tinggi karena disertai dengan testimoni dan kesaksian dari para korban yang selamat atau pun dari orang-orang yang melihat atau mengetahui kejadian, seperti keluarga, kerabat atau orang-orang dekat korban.

Upaya penyebaran informasi ini juga meliputi penggunaan simbol-simbol yang mampu menunjang kekuatan informasi. Ide dan gagasan yang diperjuangkan oleh jaringan internasional ini disimbolkan melalui cerita dan kisah yang sering diceritakan oleh ibu-ibu dalam gerakan *Madres De La Plaza de Mayo*, baik secara langsung dihadapan publik maupun yang ada dalam data-data yang dipublikasikan oleh NGO internasional. Selain itu, penggunaan kain putih yang selalu mereka pakai dalam aksi demonstrasi dan kampanye yang mereka lakukan sebagai simbol yang mewakili perjuangan atas nasib dari anak-anak mereka yang hilang dan seiring dengan meluasnya publikasi, simbol tersebut kemudian berubah menjadi simbol bagi perjuangan atas nilai-nilai HAM universal yang dipahami oleh semua orang.

Serangkaian upaya diatas kemudian mampu menarik aktor-aktor lain yang lebih kuat untuk terlibat. Serangkaian dukungan dalam bentuk material baik yang berbentuk kebijakan maupun bantuan kepada aktor-aktor yang terlibat dalam perjuangan HAM di Argentina yang dilakukan oleh beberapa negara seperti AS dan beberapa negara Eropa untuk menekan pemerintah Argentina, bahkan PBB akhirnya juga terlibat untuk menekan pemerintah Argentina. Selain tekanan dalam ranah kebijakan, pengaruh dalam aspek moral juga menjadi faktor penekan bagi negara Argentina. Kuatnya sorotan dunia

internasional terhadap kasus pelanggaran HAM membuat pemerintah Argentina ingin memulihkan nama baiknya dimata internasional, sehingga akhirnya membuka diri dan menyetujui diadakannya penyelidikan dan investigasi oleh beberapa NGO.

Tekanan internasional terhadap kasus pelanggaran HAM di Argentina yang ditambah dengan gelombang protes dan aksi demonstrasi massal di dalam negeri mengakibatkan jatuhnya rezim militer dari puncak pemerintahan di Argentina. Selanjutnya Argentina di bawah pemerintahan demokratis baru yang berbasis sipil berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang pro HAM, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sering kali tidak konsisten dan beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen dan cita-cita penegakan HAM. Hal inilah yang kemudian mendorong aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan perjuangan HAM di Argentina untuk terus bergerak dalam perjuangan penegakan HAM.

Dampak Gerakan *Madres De La Plaza de Mayo* terhadap Penegakan HAM di Argentina

Strategi gerakan *Madres De La Plaza de Mayo* untuk membangun jaringan internasional pada gilirannya mampu memberikan pengaruh dalam upaya penegakan HAM di Argentina. Pengaruh yang dihasilkan oleh jaringan internasional ini dapat dinilai dalam lima tahapan, yaitu: Pertama, Dalam tahap ini peran jaringan internasional dalam upaya penegakan HAM berhasil untuk menarik perhatian publik, baik domestik maupun internasional. Hal ini dimulai sejak munculnya respon positif berupa kunjungan dan investigasi dari beberapa NGO HAM internasional yang berhasil melakukan komunikasi dengan gerakan dan kelompok domestik Argentina seperti *Amnesty Internasional* dan IACHR. Selain itu, bermunculannya pihak media massa untuk meliput dan mempublikasikan berita secara global mengenai tindak pelanggaran HAM dan aksi protes yang dilakukan juga menjadi salah satu tolok ukurnya.

Kedua, Selanjutnya pengaruh dari jaringan internasional dalam upaya penegakan HAM di Argentina mampu mendorong perubahan keberpihakan dari negara dan beberapa organisasi regional dan internasional. Pada kasus ini, AS dan beberapa negara Eropa Barat menjadi bukti dengan mengeluarkan pernyataan dan sorotan yang disusul oleh kebijakan luar negeri yang merugikan Argentina karena dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM. Organisasi regional seperti *Organization of American States (OAS)* melalui *Inter-American Commission on Human Rights* dan organisasi internasional seperti PBB yang awalnya tidak berbuat apa-apa akhirnya berbalik menekan pemerintah Argentina.

Ketiga, Indikator pada tahapan ketiga ini mensyaratkan pada adanya perubahan prosedural secara institusional didalam pemerintahan. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya perubahan mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus Argentina, pemerintah rezim militer merespon tekanan dari dunia internasional dengan bersikap kooperatif dan membuka diri terhadap beberapa organisasi HAM internasional untuk mengadakan penyelidikan dan investigasi serta wawancara dengan aparatur- aparatur negara mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Perubahan prosedural yang dilakukan pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan praktek-praktek penghilangan paksa, juga diikuti dengan perubahan pada aspek partisipasi politik masyarakat. Perubahan ini ditandai dengan pengaktifan kembali sistem partai politik dan penunjukan terhadap masyarakat sipil untuk menjabat sebagai kepala pemerintahan tingkat provinsi.⁴¹

Keempat, Pada tahap ini, pengaruh jaringan internasional telah berhasil untuk mendorong keluarnya sejumlah kebijakan politik dari pemerintah Argentina. Bukan hanya dari pemerintah Argentina, namun telah didahului oleh keluarnya serangkaian kebijakan dari beberapa negara untuk menekan Argentina. Argentina sendiri, pasca jatuhnya rezim militer, telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya penegakan HAM, mulai dari kebijakan untuk mengadili dan menghukum anggota rezim yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM, menghapuskan beberapa undang-undang yang dinilai menghambat upaya peradilan bagi pelaku, dan mengadakan upaya perbaikan atau *reparation* bagi korban.

Kelima, Keluarnya serangkaian kebijakan dalam rangka penegakan HAM tidak serta merta menjamin keterlaksananya. Konsistensi pemerintah untuk menegakkan dan melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkannya merupakan tahap lanjutan untuk menilai tingkat keberhasilan dari pengaruh jaringan internasional penegakan HAM di Argentina. Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, pada pelaksanaannya bukan tanpa masalah. Meskipun pemerintah telah mengluarkan kebijakan perbaikan atau *reparation* bagi korban, namun tercatat beberapa kali pemerintah sendiri menunjukkan sikap yang tidak pro terhadap HAM seperti pembuatan UU *Due Obedience* dan UU *Punto Final*, serta pemberian *presidential pardon* kepada pelaku pelanggaran HAM. namun hal ini selalu menua protes baik dari dalam maupun luar negeri sehingga di tahun 2005 seperangkat UU amnesti yang terdiri dari UU *Due Obidience* dan UU *Punto Final* serta *presidential pardon* yang diberikan oleh presiden Menen kepada pemimpin rezim militer secara politik dan hukum dicabut. Pencabutan UU ini kemudian diikuti oleh serangkaian upaya peradilan yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku pelanggaran HAM.

Dampak dari peranan jaringan HAM internasional Argentina secara

⁴¹*Op cit*, sikkink, hal 428 dan Elizabeth de Lima-Dantas, hal. 71-72

husus lebih dapat terlihat dalam ranah hak sipil dan politik masyarakat karena selama masa pemerintahan rezim militer, hak sipil dan politik masyarakat memang mendapatkan tekanan yang sangat besar. Dampak perubahan kondisi sipil dan politik masyarakat Argentina dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

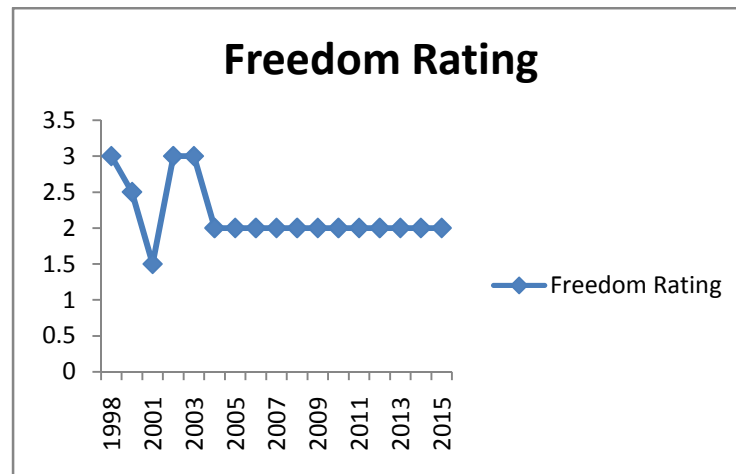


Diagram 1.

Kondisi Kebebasan Sipil dan Politik Masyarakat Argentina⁴²

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kebebasan sipil dan politik di Argentina mencapai keadaan stabil mulai pasca tahun 2003. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mulai melaksanakan penegakan HAM secara penuh. Sedikit berbeda dengan beberapa periode pemerintahan sebelumnya, dimana upaya penegakan HAM memang telah dilakukan, masih terkesan terbatas dan tidak sepenuhnya dilakukan. Salah satu indikatornya adalah penghapusan UU Amnesti dan jalannya mekanisme peradilan bagi mantan anggota militer yang terlibat kasus pelanggaran HAM tahun 1976-1983.

Hal tersebut menjadi indikator tertinggi dalam konteks upaya penegakan HAM di Argentina, melihat fakta betapa sulit dan lamanya upaya jaringan internasional untuk mendorong pemerintah Argentina melakukannya. Ini menunjukkan bahwa Argentina benar-benar serius untuk berkomitmen dan melaksanakan penegakan HAM secara penuh dalam beberapa aspek, bukan hanya yang menyangkut persoalan HAM di era rezim militer namun juga pada persoalan sipil dan politik lain. Hal ini pulalah yang menunjukkan bahwa

⁴²Sumber: www.Freedomhouse.org, *Freedom House "Freedom in the World" report*, tahun 1998-2015. Mekanisme penilaian dalam riset ini dilakukan dengan memberikan rating mulai dari 1 sampai 7 berkaitan dengan kebebasan politik dan hak sipil. Rating ini diberikan berdasarkan akumulasi nilai dari pertanyaan-pertanyaan tentang kebebasan politik dan hak sipil yang diajukan dalam riset ini oleh *Freedom House*. Tiap angka dalam rating ini mulai dari 1 sampai 7 merepresentasikan tingkat kebebasan politik dan hak sipil, dengan angka 1 menunjukkan tingkat tertinggi dari kebebasan politik dan hak sipil dan 7 menunjukkan tingkat terendah.

jaringan internasional penegakan HAM Argentina yang dibangun oleh gerakan *Madres De La Plaza de Mayo* memiliki pengaruh yang berdampak pada penegakan HAM yang secara spesifik lebih banyak pada ranah sipil dan politik bagi Argentina.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data dan fakta-fakta dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Argentina pada tahun 1976 mengalami kudeta militer yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan sipil yang diganti dengan pemerintahan rezim militer sampai pada tahun 1983. Selama masa pemerintahan rezim militer di Argentina, banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah negara terhadap masyarakat sipil. Kondisi ini kemudian memunculkan upaya protes dan penentangan dari masyarakat Argentina melalui organisasi dan kelompok gerakan sosial domestik, salah satunya yang menjadi pelopor adalah gerakan *Madres De La Plaza de Mayo*.
2. Strategi yang diterapkan oleh gerakan *Madres De La Plaza de Mayo* berhasil menekan dan mempengaruhi pemerintah Argentina. Pengaruh dari keberhasilan jaringan internasional ini dapat dilihat dari meluasnya isu dan wacana atas persoalan yang terjadi di Argentina dan diikuti oleh keterlibatan aktor-aktor lain untuk mendukung mereka, yang sekaligus memberikan tekanan bagi pemerintah Argentina sehingga memunculkan perubahan prosedur institusional dalam pemerintahan yang mendorong perubahan kebijakan sehingga mempengaruhi kondisi domestik. Dampak yang dihasilkan dari pengaruh peran jaringan internasional ini salah satunya yang paling dapat terlihat adalah dengan jatuhnya rezim militer yang kemudian menjadi langkah awal bagi munculnya serangkaian kebijakan dan tindakan penegakan HAM di Argentina. Hal ini kemudian membawa perubahan bagi Argentina, dimana masyarakat dapat merasakan dan menikmati kebebasan dan kemerdekaan atas HAM dalam kehidupan mereka, terutama dalam aspek hak sipil dan politik.

Saran

1. Gerakan *Madres De La Plaza de Mayo* perlu untuk terus konsisten dan menjaga keberpihakan terhadap nilai HAM yang mereka perjuangkan. Hal ini diperlukan karena dengan melihat bahwa sebelum tahun 2003, kondisi politik, ekonomi dan pergantian pemerintahan di Argentina cukup berpengaruh terhadap implementasi kebijakan HAM di Argentina. Oleh karena itu, upaya menjaga keberpihakan dan independensi sangat diperlukan dalam rangka mengawal jalannya penegakan HAM di Argentina,

agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi yang dapat mengakibatkan turunnya konsistensi pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan HAM.

2. Para pengkaji ilmu Hubungan Internasional diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap fenomena-fenomena internasional yang melibatkan gerakan atau kelompok sosial masyarakat dalam mempengaruhi dan membentuk wacana internasional. Hal ini kemudian akan semakin memperkaya dan mengasah kepekaan akademisi dalam mengamati kondisi internasional. Selain itu, bagi para pelaku gerakan dan praktisi hubungan internasional diharapkan dapat memperkaya metodologi dan strategi dalam mengembangkan praktik-praktik hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bouvard, Marguerite, 1994, *Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza De Mayo Latin American Silhouettes*, Scholarly Resources, Inc, hal. 1.
- De Lima-Dantas, Elizabeth, 1985, *Argentina a country study*, Washington D.C, diedit oleh James D Rudolph, American University Foreign Area Studies, Department of the Army. Hal. 66-67
- Dinges, John, 2005, *The Condor years : how Pinochet and his allies brought terrorism to three continents*, New York, The New Press, chapter 2.
- Jackson dan Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Karbo dan Lee Ray, 2011, *Global Politics, Boston: Wadsworth, hal. 116-117*

JURNAL, TESIS, ARTIKEL

- Colas, Alejandro, 2002, *International Civil Society – Social Movements in World Politics*, Cambridge, Polity Press.
- Cox, David, 2008, *Dirty Secrets, Dirty War*. Charleston: Evening Post Publishing Company, Kindle edition dalam Sarah Cusick, 2013, *PERSPECTIVES AND ANGLES: A JOURNALISTIC HISTORY THROUGH THE ARGENTINE POLITICAL IDENTITY FROM 1946-1983*, Appalachian State University.
- Delgado, Andres, 2012, *Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina*, University of South Florida.
- Keck, and sikkink, 1999, *Transnational advocacy networks in international dan regional poitics*, UNESCO, Blackwell Publishers.
- Koepsel, Rachel, 2011, *Mothers of the Plaza de Mayo: First Responders for Human Rights*, Case-Specific Briefing Paper, University of Denver.
- Schuler, Marge, *Human Rights Manual* dalam Hillary Coulby, 2008, INTRAC

Advocacy and Campaign course Toolkit, Cyprus.

Torres, Germán, 2013, *Catholic Church, Education and Laicity in Argentinean History, Buenos Aires, Argentina*

Weissbrodt, David and Maria Luisa Bartolomei, 1991, *The Effectiveness of International Human Rights Pressures: The Case of Argentina, 1976-1983, Minnesota Law Review vol. 7 page 1016, University of Minnesota Law School Scholarship Repository.*

DOKUMEN

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

United Nations, 1948 *United Nations Universal Declaration of Human Rights, article 1, 2, 3, 5, 7*

WEBSITE

Elements of Crime https://www.icccpi.int/en_menus/icc/about_the_court/frequently_asked_questions/Pages/12.aspx, diakses pada 4 Januari 2016

Gilda Rodriguez, 2004, *The political performance of Motherhood: Las Madres de Plaza de Mayo*, dalam serendip. brynmawr.edu/sci_cult/courses/knowbody/f04/web3/grodriguez.html diakses pada 15 Januari 2016.

<https://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines.html> diunduh pada 6 Februari 2016.

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_245.htm diakses pada 13 Januari 2016.

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_005.htm diakses pada 16 Januari 2016.

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_209.htm diakses pada 17 Januari 2016.

<http://www.trial-ch.org/en/resources/truthcommissions/america/argentina.html> diakses pada 2 Februari 2016

<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-USA-Accountability-Pardons-Countries-ResearchBrief-Nov08.pdf>. diunduh pada 4 Februari 2016.

Penchaszadeh dan Schuler-Faccini, 2013, *Genetics and human rights. Two histories: Restoring genetic identity after forced disappearance and identity suppression in Argentina and after compulsory isolation for leprosy in Brazil* dalam <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3983581> diakses pada 2 Februari 2016

www.freedomhouse.org, Freedom House "Freedom in the World" report, tahun 1998-2015. Diakses pada 11 Maret 2016

